



**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN
NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG PADA
PT ASURANSI JIWASRAYA
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931K/Pidsus/2021)**

TESIS

YULLY LESTARI TASDIKIN

2010622033

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**



**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN
NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG PADA
PT ASURANSI JIWASRAYA
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931K/Pidsus/2021)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

YULLY LESTARI TASDIKIN

2010622033

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua yang dikutip dirujuk telah syaa nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : YULLY LESTARI TASDIKIN

NIM : 2010622033

Tanggal : 01 Juli 2022

Jakarta, 15 Agustus 2022
Yang Menyatakan,



YULLY LESTARI TASDIKIN

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULLY LESTARI TASDIKIN
NIM : 2010622033
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana

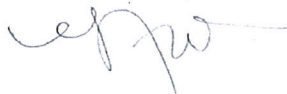
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG PADA PT ASURANSI JIWASRAYA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931K/Pidsus/2021)

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022
Yang Menyatakan,




YULLY LESTARI TASDIKIN

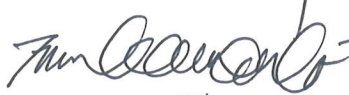
PENGESAHAN

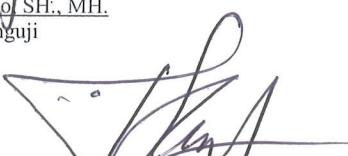
Tesis di ajukan oleh :

Nama : YULLY LESTARI TASDIKIN
NRP : 2010622033
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana
Judul Tesis : PROBLEMATIKA PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN
NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN PENCUCIAN UANG PADA PT ASURANSI
JIWASRAYA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor
2931K/Pidsus/2021)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Dr. Heru Sugiyono, SH., MH.
Ketua Penguji


Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.
Penguji I


Dr. Slamet Pri Wahyudi, SH., MH.
Penguji II/ Pembimbing


Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan


Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LL.M
Kaprodi



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 19 Juli 2022

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG PADA PT ASURANSI JIWasRAYA

(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931K/Pidsus/2021)

YULLY LESTARI TASDIKIN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewenangan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam penyelesaian barang rampasan negara pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya serta menganalisis tentang problematika penyelesaian barang rampasan negara yang dinyatakan dirampas untuk negara. *Teori yang digunakan*, adalah teori negara hukum, teori penegakan hukum dan teori kewenangan. *Metode penelitian*, yang digunakan, adalah metode penelitian yuridis normatif. *Hasil penelitian*, sisi penegakan hukum, pengurusan barang rampasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi eksekutorial dalam rangka menjalankan putusan pengadilan. Kewenangan eksekutorial ini melekat secara fungsional pada jaksa sebagai penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Terkait barang rampasan, kewenangan eksekutorial jaksa secara spesifik diatur dalam pasal 273 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Beleid* tersebut memberi kewenangan jaksa, dalam jangka waktu tertentu, untuk menguasai penjualan atas barang rampasan kepada kantor lelang dan menyetorkan hasil penjualannya ke kas negara. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kewenangan Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang diterapkan dalam penyelesaian barang rampasan negara pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya serta adanya problematika dari penyelesaian barang rampasan negara berupa kapal yang dinyatakan dirampas untuk negara yaitu terdapat gugatan perdata yang menyatakan Kejaksaan Agung dan Pusat Pemulihan Aset telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: barang rampasan, negara.

**PROBLEMS OF THE SETTLEMENT OF STATE LOOTED GOODS IN THE
CRIMINAL ACT OF CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING AT
PT ASURANSI JIWASRAYA**

(Case Study: Supreme Court Decision Number 2931K/Pidsus/2021)

YULLY LESTARI TASDIKIN

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the authority of the Asset Recovery Center (PPA) in the settlement of state confiscation in the corruption and money laundering cases of PT Asuransi Jiwasraya and to analyze the problems of the settlement of state booty which was declared confiscated for the state. The theory used is the rule of law theory, law enforcement theory and authority theory. The research method used is a normative juridical research method. The results of the study, from the side of law enforcement, management of booty are part of the implementation of the executorial function in order to carry out court decisions. This executive authority is functionally attached to the prosecutor as a public prosecutor who is authorized by law to carry out prosecutions and carry out judges' decisions. Regarding booty, the prosecutor's executorial authority is specifically regulated in Article 273 paragraphs 3 and 4 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). The regulation authorizes the prosecutor, within a certain period of time, to authorize the sale of confiscated goods to the auction office and deposit the proceeds of the sale into the state treasury. The results of this study are the authority of the Asset Recovery Center (PPA) which is applied in the settlement of state confiscated goods in the corruption and money laundering cases of PT Asuransi Jiwasraya as well as the problems of the settlement of state confiscated goods in the form of ships that are declared confiscated for the state, namely there is a civil lawsuit. which stated that the Attorney General's Office and the Asset Recovery Center had committed unlawful acts.

Keywords: booty, state.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena berkat rahmat dan karunia Allah SWT, tesis dengan judul **“PROBLEMATIKA PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG PADA PT ASURANSI JIWASRAYA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931K/Pidsus/2021)”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan tugas akhir studi yang dijalani penulis di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, Penulis merasa tesis ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun, dengan ketekunan, tekad, serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam studi maupun dari tahap penulisan sampai tesis ini selesai tidak mungkin disebutkan seluruhnya. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu antara lain:

1. Dr. Erna Hernawati, A.k, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M., sebagai Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH., MH., sebagai dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

5. Seluruh staff dosen pengajar dan para staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Seluruh Teman-Teman angkatan 2020 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
7. Orang tua Penulis Mani (Mamah Nini) Rahmawati dan Paki (Papa Aki) Dodi Tasdikin (Almarhum) yang telah mendukung baik materil maupun imateril.
8. Suami Penulis Muhammad Fattah dan Anak-Anak Penulis, Elano Kanahaya Fattah dan Jehanaya Amanina Fattah yang telah memberikan dukungan penulis untuk segera menyelesaikan tesis Penulis.
9. Adik-adik Penulis Adhyarini Anastasia Tasdikin dan Ferdi Hermawan, serta semua keluarga dan teman-teman baik Penulis yang selalu mengigatkan dan menyemangati penulis untuk selalu mengerjakan tesis ini.

Penulis juga menyadari kekurang sempurnaan dalam penulisan tesis ini, dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca guna penyempurnaan tesis ini.

Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bidang hukum pidana pada khususnya.

Jakarta, 01 Agustus 2022

Yully Lestari Tasdikin

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Kerangka Teoritis..... | 9 |
| 1.6 Kerangka Konseptual..... | 17 |
| 1.7 Metode Penelitian..... | 18 |
| 1.8 Sistematika Penulisan..... | 21 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 23 |
| 2.1 Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 23 |
| 2.2 Kewenangan Pusat Pemulihan Aset Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Pidana | 31 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 54 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 54 |
| 3.2 Sumber Data..... | 56 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 58 |
| 3.4 Teknik Pengolahan Data..... | 59 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 61 |
| 4.1 Penerapan Kewenangan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam Penyelesaian Barang Rampasan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang PT Asuransi Jiwasraya (Persero)..... | 61 |
| 4.2 Problematika Penyelesaian Barang Rampasan Negara Terhadap Kapal yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara terdapat Gugatan Perdata Bagi Terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/202..... | 72 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 80 |
| 5.2 Saran..... | 81 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| RIWAYAT HIDUP..... | |